

1. Danamas, PT Pasar Dana Pinjaman
2. Amarnya, PT Amarnya Miko Fintek
3. Dompot Kilat, PT Indo FinTek
4. Boost, PT Creative Mobile Adventure
5. Toko Modal, PT Toko Modal Mitra Usaha
6. Modalku, PT Mitrausaha Indonesia Grup
7. KTA Kilat, PT Pendanaan Teknologi Nusa
8. Kredit Pintar, PT Kredit Pintar Indonesia
9. Maucash, PT Astra Welab Digital Arta
10. Finmas, PT Oriente Mas Sejahtera
11. KlikA2C, PT Aman Cermat Cepat
12. Akseleran, PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia
13. Ammana, PT Ammana Fintek Syariah.
14. PinjamanGO, PT Dana Pinjaman Inklusif
15. KoinP2P, PT Lunaria Annua Teknologi.
16. Pohondana, PT Pohon Dana Indonesia
17. Mekar, PT Mekar Investama Sampoerna
18. AdaKami, PT Pembiayaan Digital Indonesia
19. Esta Kapital Fintek, PT Esta Kapital Fintek
20. KreditPro, PT Tri Digi Fin
21. FINTAG, PT Fintagra Homido Indonesia
22. RupiahCepat, PT Kredit Utama Fintech Indonesia
23. Crowd, PT Mediator Komunitas Indonesia
24. Indodana, PT Artha Dana Teknologi
25. JULO, PT Julu Teknologi Finansial
26. Pinjamin, PT Progo Puncak Group
27. DanaRupiah, PT Layanan Keuangan Berbagi
28. OVO Finansial, PT Indonusa Bara Sejahtera
29. PinjamModal, PT Finansial Integrasi Teknologi
30. Alami, PT Alami Fintek Syariah.
31. AwanTunai, PT Simplefi Teknologi Indonesia
32. Danakini, PT Dana Kini Indonesia
33. Singa, PT Abadi Sejahtera Finansindo
34. Danamerdeka, PT Intekno Raya
35. Easycash, PT Indonesia Fintopia Technology
36. Pinjamyuk, PT Kuaikuai Tech Indonesia
37. Finplus, PT Rezeki Bersama Teknologi
38. Uangme, PT Uangme Fintek Indonesia
39. PinjamDuit, PT Stanford Teknologi Indonesia
40. DANA SYARIAH, PT Dana Syariah Indonesia
41. BATUMBU, PT Berdayakan Usaha Indonesia
42. Cashcepat, PT Artha Permata Makmur
43. klikUMKM, PT Pinjaman Kemakmuran Rakyat
44. Pinjam Gampang, PT Kredit Plus Teknologi
45. cicil, PT Cicil Solusi Mitra Teknologi.
46. lumbungdana, PT Lumbung Dana Indonesia
47. KrediOne, PT Inovasi Terdepan Nusantara
48. Kreditnesia, PT Kreditku Teknologi Indonesia
49. Pintek, PT Pinduit Teknologi Indonesia
50. ModalRakyat, PT Modal Rakyat Indonesia

# UTANG PINJOL WARGA RI CAPAI RP83,52 T

Tingkat pinjaman online (Pinjol) di Indonesia ternyata cukup fantastis. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan hingga Juni 2025, total pembiayaan outstanding pinjol mencapai Rp 83,52 triliun. Angka tersebut ternyata menunjukkan adanya peningkatan atau tumbuh 25,06% secara tahunan/year on year (YoY). Data tersebut menunjukkan bahwa minat warga Republik Indonesia (RI) untuk pinjam atau utang di pinjol semakin tinggi. Ternyata, peningkatan pinjaman ini juga disertai dengan turunnya tingkat kredit macet atau TWP90 ke level 2,85% dari sebelumnya 3,19% pada Mei 2025. Meski demikian, OJK masih menerima 8.929 laporan terkait pinjol ilegal, dan juga memblokir 1.556 entitas. OJK menilai angka tersebut masih cukup tinggi, bahkan kasus fraud atau tindakan penipuan atau kecurangan dalam aktivitas bisnis yang melibatkan transaksi keuangan juga tinggi. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Modal Ventura, dan Lembaga Keuangan Mikro OJK, Agusman, Senin (4/8/2025), mengatakan sepanjang Juni 2025, OJK menjatuhkan sanksi administratif kepada 30 perusahaan fintech peer-to-peer (P2P) lending karena melanggar ketentuan peraturan yang berlaku. Untuk itu, OJK kembali memperketat pengawasan terhadap industri pinjol menyusul maraknya kasus fraud dan hasilnya ditemukan sejumlah pelanggaran.



BACA HAL 11...



## PEMERINTAH TARGET CKG JANGKAU 53 JUTA PESERTA DIDIK

Tenaga medis melakukan pengecekan kesehatan pada siswa.

Pemerintah menargetkan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) mampu menjangkau 53 juta peserta didik di seluruh Indonesia pada 2025. Program ini akan menjangkau 282.317 satuan pendidikan, mulai dari SD hingga SMA/SMK, termasuk madrasah, pesantren, sekolah luar biasa (SLB), serta sekolah rakyat.

Sementara itu, secara keseluruhan Pemerintah menargetkan total 281 juta penduduk akan menjadi penerima manfaat CKG, termasuk 53,8 juta siswa dari 282.317 dari berbagai satuan Pendidikan.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, Senin (4/8/2025), menyampaikan bahwa program ini merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang unggul.

"Jadi di masa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo dan Mas Gibran ini, kita mendorong sumber daya manusia yang unggul. Jadi ada berbagai inovasi-inovasi kebijakan yang dilakukan," kata Budi saat meninjau pelaksanaan CKG di SMP Negeri 5 Bandung, dilansir antara, Senin (4/8/2025)

Dalam program CKG ini, setidaknya ada 13 indikator kesehatan dicek untuk siswa SD, 15 untuk SMP, dan 14 untuk SMA. Hasil pemeriksaan sejauh ini mengungkapkan bahwa masalah kesehatan gigi dan mata menjadi yang paling dominan ditemukan di kalangan pelajar.

"Kayak tadi ini dari 14 sudah dicek, sembilan pelajar punya masalah mata.

Kadang-kadang itu nilainya jelek bukan gara-gara bodoh, tetapi gara-gara gak bisa lihat."

Dalam pelaksanaan program ini, kata dia, Kementerian Kesehatan mengerahkan dukungan dari 10.000 puskesmas dengan melibatkan lebih dari 500.000 tenaga kesehatan. Pemeriksaan juga dilakukan di madrasah, pesantren, dan sekolah swasta.

"Per kemarin sudah 16 juta orang diperiksa. Setiap hari rata-rata 250-280 ribu anak ikut serta dalam program ini. Jawa Barat sudah mencapai 2,4 juta orang," kata Budi.

Ia juga menegaskan bahwa layanan ini sepenuhnya gratis, termasuk tindak lanjut pengobatan gigi di puskesmas atau pemanggilan dokter ke sekolah melalui UKS.

"Kalau ada yang minta duit, laporkan ke Pak Wali atau Pak Wagub. Ini hadiah dari Presiden Prabowo untuk seluruh rakyat Indonesia," katanya.

Sejak kali pertama diluncurkan pada 10 Februari 2025, program CKG telah menjangkau lebih dari 16 juta orang hingga 1 Agustus 2025.

Budi menuturkan, hasil awal menunjukkan bahwa masalah gigi menjadi keluhan paling umum pada anak-anak, disusul gangguan mata dan anemia. Selain itu,



Jadi di masa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo dan Mas Gibran ini, kita mendorong sumber daya manusia yang unggul. Jadi ada berbagai inovasi-inovasi kebijakan yang dilakukan,"

**BUDI GUNADI  
SADIKIN**  
Menteri Kesehatan

CKG Sekolah juga mencakup pemeriksaan kesehatan jiwa, mengingat selama ini deteksi dini terhadap gangguan mental anak masih belum optimal.

"Di cek kesehatan gratis sekolah ini kita juga mulai memperkenalkan cek kesehatan jiwa. Karena banyak selama ini kita tidak bisa mengidentifikasi kalau ada masalah kejiwaan, kesehatan jiwa di anak-anak kita," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menyampaikan bahwa program CKG Sekolah merupakan bagian fundamental dalam upaya pemerintah untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang unggul

"Ini adalah program yang paling fundamental dari SDM unggul karena kalau tanpa didukung oleh kesehatan yang prima, baik itu kesehatan fisik,

kesehatan mental, dan kesehatan moral maka kompetensi tidak bisa maksimal. Oleh karena itu, untuk membangun SDM unggul ini isu kesehatan ini menjadi sangat fundamental bagi anak-anak kita," ujar Pratikno.

Tak hanya pemeriksaan kesehatan, Menko PMK juga menekankan pentingnya untuk memperbaiki ekosistem hidup sehat bagi anak-anak Indonesia.

"Mohon kepada bapak/ibu guru, kepada orang tua untuk memperbaiki ekosistem hidup sehat bagi anak-anak, termasuk di antaranya kualitas sanitasi, kualitas air bersih, kebersihan di sekolah, kebersihan di kantin sekolah, juga bagaimana mengedukasi anak-anak untuk makan dan minum yang baik, jajan yang baik bagi kesehatan mereka, berolahraga secara baik, tetap bergembira," kata Pratikno.

Lebih lanjut, Menko PMK menyampaikan apresiasi kepada kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan semua pihak yang telah mendukung program pemeriksaan kesehatan gratis bagi anak sekolah dan sekaligus peningkatan kualitas kesehatan anak-anak.

"Secara khusus, terima kasih kepada para guru, orang tua, tenaga kesehatan, tenaga medis, khususnya yang bapak/ibu yang di puskesmas yang bekerja keras luar biasa untuk menyukseskan program kesehatan gratis ini," tandas Menko PMK.

Terpisah, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi menyatakan bahwa pelaksanaan Program CKG di sekolah akan memperluas cakupan layanan yang hingga kini telah menjangkau 16 juta penerima manfaat.

"Diharapkan, CKG untuk anak-anak sekolah ini bisa mencapai 53 juta penerima manfaat. Sementara di luar sekolah (masyarakat umum-red) sampai hari ini sudah 16 juta penerima manfaat," katanya se usai meninjau kick off CKG di SMAN 6 Tangerang Selatan, Senin (4/8/2025).

Menurut Hasan, langkah ini diharapkan dapat menambah jumlah penerima manfaat secara signifikan, khususnya dari kalangan pelajar.

"Selain program Makan Bergizi Gratis, salah satu program prioritas pemerintah yang juga dilaksanakan secara masif adalah cek kesehatan gratis," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan CKG di sekolah ditargetkan menjangkau hingga 53 juta siswa, dari jenjang SD hingga SMA dan sederajat. Ini merupakan bagian dari perluasan layanan kesehatan promotif dan preventif yang sebelumnya telah menjangkau masyarakat umum. (ant,ist/lut)



Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun

# KOMISI XI DPR RI : IMPLEMENTASI PMK SOAL EMAS PERLU DIAWASI

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menilai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 51 tahun 2025 dan PMK No. 52 tahun 2025 yang telah ditetapkan pada 25 Juli 2025 dan mulai berlaku efektif sejak 1 Agustus 2025 soal ekosistem emas perlu diawasi dengan ketat.

**M**isbakhun mengatakan kebijakan yang mengenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,25 persen atas pembelian emas batangan oleh bullion bank, yang disertai berbagai pengecualian strategis, merupakan sebuah langkah strategis dan positif.

Dia menilai kebijakan ini sebagai terobosan yang dirancang secara cermat untuk mendorong efisiensi sistem, meningkatkan likuiditas, dan menjaga daya saing sektor emas di

dalam negeri di tengah tantangan pasar global.

"Peraturan tersebut perlu penguatan untuk menjamin kepastian hukum dan menutup celah yang berpotensi merugikan negara," kata politisi senior Partai Golkar dalam siaran pers resmi dilansir antara Senin (4/8/2025).

Dia menandakan bahwa tanpa perbaikan yang solid, maka tujuan mulia dari penerbitan regulasi ini dikhawatirkan tidak akan tercapai sepenuhnya.

"Penguatan yang dimaksud mencakup perumusan definisi operasional yang lebih rigid dan tidak multitafsir di dalam batang tubuh peraturan, memperjelas perlakuan skema pajak untuk transaksi emas non fisik atau digital yang volumenya terus meningkat, sebuah aspek yang belum diatur secara eksplisit," katanya.

Selain itu, Misbakhun juga mengatakan perlunya membangun sistem pengawasan efektif yang terintegrasi antar lembaga terkait untuk memantau seluruh rantai transaksi emas. Dengan adanya sistem ini, diharapkan manfaat ekonomi dari sektor emas dapat dirasakan secara maksimal oleh negara dan masyarakat.

"Perumusan definisi yang presisi, kejelasan pajak transaksi digital, dan terutama sistem pengawasan yang terintegrasi adalah kunci mutlak agar tujuan besar kita untuk efisiensi

sistem dan optimalisasi penerimaan negara benar-benar tercapai tanpa ada kebocoran," tutup Misbakhun.

Sementara itu, kehadiran aturan baru ini sebagai respons terhadap meningkatnya aktivitas perdagangan emas batangan di Indonesia, terutama melalui lembaga jasa keuangan penyelenggara kegiatan usaha emas. Aturan baru ini diharapkan bisa

menyempurnakan ekosistem perdagangan emas nasional serta menghindari terjadinya pemungutan pajak ganda yang sebelumnya sempat menjadi masalah.

Dilansir dari VOI, sejak diluncurkan pada 26 Februari 2025, transaksi di bullion bank telah menembus angka Rp1 triliun per April 2025. Saat ini, dua lembaga telah resmi beroperasi sebagai bullion bank, yakni PT Pegadaian (Persero) dan PT Bank Syariah Indonesia (BSI).

Dalam PMK Nomor 51 Tahun 2025 menjelaskan bahwa pemerintah kini menetapkan tarif PPh Pasal 22 sebesar 0,25 persen atas pembelian emas batangan oleh bullion bank yang telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tarif ini dikenakan atas harga pembelian emas sebelum Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Ketentuan ini menandai perubahan signifikan dari aturan sebelumnya, yang kerap menimbulkan praktik saling pungut pajak, yang akhirnya menimbulkan beban ganda dan ketidakefisienan dalam transaksi emas nasional.

Dengan aturan baru ini, peran sebagai pemungut PPh Pasal 22 beralih secara resmi ke lembaga jasa keuangan bullion. Hal ini diharapkan dapat menyederhanakan proses perpajakan dan mendorong efisiensi administrasi fiskal di sektor logam mulia.

Meskipun PPh Pasal 22 diberlakukan atas pembelian emas batangan oleh bullion bank, terdapat beberapa pengecualian yang diatur dalam PMK 52 Tahun 2025. Pemungutan pajak tidak dilakukan dalam beberapa kondisi berikut: Penjualan emas batangan kepada konsumen akhir; Wajib pajak pelaku UMKM yang menggunakan skema PPh final dan telah dikonfirmasi peredaran brutonya oleh Direktorat Jenderal Pajak; Wajib pajak dengan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 22; dan Penjualan emas kepada Bank Indonesia, pasar fisik emas digital, dan lembaga jasa keuangan bullion berizin OJK.

Pengecualian ini bertujuan melindungi kelompok konsumen kecil dan pelaku UMKM, sekaligus memberikan kejelasan hukum dalam transaksi emas batangan. Dengan demikian, tidak semua transaksi emas akan dikenakan pajak, melainkan hanya yang sesuai dengan ketentuan dalam regulasi terbaru.

Aspek lain yang juga disorot dalam PMK 51 Tahun 2025 adalah penghapusan skema Surat Keterangan Bebas (SKB) atas impor emas batangan. Sebelumnya, emas yang diimpor tidak dikenakan PPh Pasal 22 karena adanya SKB. Hal ini menimbulkan ketimpangan karena pembelian di dalam negeri justru dikenakan pajak.

Kini, dengan penghapusan SKB impor, pembelian emas dari luar negeri juga akan dikenai PPh Pasal 22 sebesar 0,25 persen, seragam dengan transaksi domestik. Langkah ini diambil untuk menciptakan kesetaraan perlakuan pajak serta memperkuat preferensi terhadap produk emas domestik. (han,ant,ist/lut)

## POIN PENTING IMPLEMENTASI PMK 51 & 52 TAHUN 2025 TENTANG EKOSISTEM EMAS

- **Perlu Pengawasan Ketat**  
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai PMK No. 51 dan 52 Tahun 2025 tentang ekosistem emas perlu diawasi agar tujuan regulasi tercapai tanpa kebocoran.
- **Tujuan Regulasi**  
Penaan PPh Pasal 22 sebesar 0,25% atas pembelian emas batangan oleh bullion bank diharapkan meningkatkan efisiensi, likuiditas, dan daya saing sektor emas.
- **Penguatan Aturan**  
Diperlukan definisi operasional yang jelas, pengaturan pajak untuk emas digital, dan sistem pengawasan terpadu antar lembaga.
- **Perubahan Pajak dan Pengecualian**  
Pajak diberlakukan seragam untuk emas domestik dan impor, dengan pengecualian bagi konsumen akhir, UMKM, Bank Indonesia, pasar fisik emas digital, dan lembaga bullion berizin OJK.
- **Latar Belakang Kebijakan**  
Aturan baru merespons peningkatan perdagangan emas batangan dan bertujuan menghapus pajak ganda serta mendukung pertumbuhan ekosistem bullion nasional.



**Penguatan yang dimaksud mencakup perumusan definisi operasional yang lebih rigid dan tidak multitafsir di dalam batang tubuh peraturan, memperjelas perlakuan skema pajak untuk transaksi emas non fisik atau digital yang volumenya terus meningkat, sebuah aspek yang belum diatur secara eksplisit,"**

**MUKHAMAD  
MISBAKHUN**

Ketua Komisi XI DPR RI



# CERITA TOM LEMBONG BELUM BERAKHIR, GILIRAN PARA HAKIM DILAPORKAN KE MA



Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong keluar dari Rumah Tahanan (Rutan) Cipinang, di Jakarta, Jumat (1/8/2025) malam. (ist)

**Tom Lembong resmi laporkan tiga hakim yang memvonisnya 4,5 tahun penjara ke Mahkamah Agung (MA). Bahkan salah satu hakim dinilai tidak mengedepankan presumption of innocent (asas praduga tak bersalah).**

**M**antan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong resmi melaporkan hakim kasus korupsi impor gula ke Mahkamah Agung (MA). Mereka memvonis Tom 4 tahun 6 bulan penjara, sebelum akhirnya dia bebas karena mendapatkan abolisi.

Pelaporan ini dilakukan oleh tim penasihat hukum Tom Lembong. Mereka tiba di Gedung Pelayanan Terpadu Satu Pintu MA, Senin (4/8/2025) sekitar pukul 12.45.

"Yang dilaporkan) seluruh majelis hakim yang memutus perkara Pak Tom ini, karena tidak ada dissenting di situ," kata penasihat hukum Tom, Zaid Mushafi, kepada awak media di Gedung MA, Jakarta Pusat.

Mereka yang dilaporkan adalah Dennie Arsan Fatrika selaku ketua majelis hakim, serta Purwanto S Abdullah dan Alfis Setyawan selaku hakim anggota. Adapun dissenting yang ia maksud merujuk pada dissenting opinion atau pendapat berbeda yang tidak setuju dengan keputusan mayoritas dalam suatu putusan pengadilan.

"Namun yang menjadi catatan adalah ada salah satu hakim anggota yang menurut kami selama proses persidangan itu tidak mengedepankan presumption of innocent (asas praduga tak bersalah)," ujar Zaid. Hakim tersebut, menurut dia, justru mengedepankan presumption of guilty atau asas praduga bersalah. "Jadi Pak Tom ini seolah-olah memang orang yang udah bersalah, tinggal dicari aja alat buktinya."

Zaid mulanya tak menyebutkan siapa hakim anggota yang dimaksud. Namun, lambat laun dia mengatakan nama Alfis Setyawan.

"Yang cenderung, menurut kami, tidak melakukan unprofessional conduct (tindakan tidak profesional) adalah hakim anggota Pak Alfis," ujarnya.

Dia menjelaskan, ini bisa dilihat dari persidangan sebelumnya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Zaid mengklaim, Alfis menggiring suatu kesimpulan berdasarkan keterangan saksi-saksi di pengadilan.

"Terlebih lagi, pada saat dikatakan bahwasannya Pak Tom Lembong itu mengedepankan ekonomi kapitalis. Itu beliau yang membacakan pertimbangannya," ujar Zaid.

Di sisi lain dari pertimbangan itu, lanjut dia, menyatakan bahwa yang melaksanakan penugasan dari

pemerintah adalah koperasi. Zaid lantas mempertanyakan, apakah koperasi ini adalah simbol atau cerminan dari pelaksanaan ekonomi kapitalis. Padahal, koperasi tersebut telah membantu proses distribusi gula ke pelosok negeri.

Lebih jauh, Zaid mengatakan niat Tom melaporkan majelis hakimnya bukan untuk menyerang mereka atau institusi Mahkamah Agung. "Tapi dia dalam rangka ini perbaikan, evaluasi agar tidak ada lagi masyarakat Indonesia yang mengalami seperti dirinya."

Menurut Zaid, Tom Lembong berkeinginan agar penelusuran dilakukan, meski kliennya telah mendapatkan abolisi dari pemerintah. Tom Lembong, kata Zaid,

menginginkan perbaikan sistem hukum yang menyeluruh agar tak ada orang lain yang merasa perlakuan serupa.

Zaid mengatakan, laporan kepada MA juga mencerminkan semangat untuk memperbaiki proses penegakan hukum di Tanah Air.

Tom disebut merasa perjuangan dia tidak cukup sampai menerima kebebasan. Akan tetapi, jaminan keadilan yang sama juga harus berlaku bagi orang lain. (wid,rls,tmo/dya)

## RINGKASAN KASUS TOM LEMBONG

**1.PENYELIDIKAN:**  
Dimulai Oktober 2023 hingga penetapan tersangka Oktober 2024

**2.TAHAP PRA-PENGADILAN & SIDANG:**  
-November 2024: praperadilan → ditolak  
-Sidang berlangsung Maret-Juli 2025

**3.VONIS:**  
4,5 tahun penjara + denda Rp 750 juta (subsider 6 bulan penjara)

**4.ABOLISI**  
- **Usulan:** 31 Juli 2025 Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, secara resmi mengusulkan kepada Presiden Prabowo.  
- **Disetujui DPR:** 1 Agustus 2025 dikeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18 Tahun 2025 tentang abolisi.  
- **Pembebasan:** Malam 1 Agustus 2025 dengan proses hukum dihentikan sepenuhnya

**# Tom melaporkan Hakim ke MA**  
4 Agustus 2025, Tom Lembong melalui kuasa hukumnya melaporkan Dennie Arsan Fatrika selaku ketua majelis hakim, serta Purwanto S Abdullah dan Alfis Setyawan selaku hakim anggota ke MA.



Dalam kasus ini, Tom telah divonis bersalah. Dia dihukum 4,5 tahun penjara dan denda Rp 750 juta subsider 6 bulan kurungan. (wid,rls,ist/dya)

## iPad dan Laptop Belum Dikembalikan Kejagung

**KEJAKSAAN** Agung (Kejagung) segera mengembalikan iPad dan laptop milik mantan Mendag, Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong. Dua gadget itu sebelumnya telah diputus hakim untuk dikembalikan ke Tom.

"Pastinya penuntut umum segera mengembalikan," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, kepada wartawan, Senin (4/8/2025).

Anang melanjutkan, nantinya pengembalian akan dilakukan dengan melakukan pemanggilan terhadap pihak Tom Lembong. Pengembalian nantinya akan dilakukan oleh jaksa penuntut umum pada Kejari Jakarta Pusat.

"Dikasihkan barang itu dengan dibuatkan berita acara," lanjutnya.

Sebelumnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menyatakan iPad dan laptop milik Tom Lembong harus dikembalikan. Dua gawai itu disita terkait perkara korupsi impor gula yang menjerat Tom.

"Barang bukti tablet merek Apple

jenis iPad Pro warna silver; dan 1 unit laptop merek Apple (MacBook) warna silver. Barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa melalui penasihat hukumnya," kata Ketua Majelis Hakim, Dennie Arsan Fatrika, saat membacakan amar putusan dalam persidangan, Jumat (18/7/2025).

Sementara, hakim anggota, Alfis Setiawan, menambahkan dua gadget tersebut dinyatakan tak terkait dengan tindak pidana.

Adapun dua gawai itu sebelumnya ditemukan di dalam kamar tahanan Tom Lembong. Jaksa menyebut, penyitaan itu diajukan lantaran iPad dan laptop tersebut ditemukan di kamar Tom Lembong saat dilakukan sidak di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Jaksa bahkan meminta agar iPad dan laptop tersebut dimusnahkan.

Sementara Tom mengaku dua gawai itu digunakannya untuk menulis pleidoi atau nota pembelaan terkait dugaan korupsi impor gula yang menjeratnya.

# INDONESIA LOBI TARIF TRUMP LAGI MINTA DISKON UNTUK IMPOR KOMODITAS

Pemerintah Amerika Serikat (AS) memastikan akan memulai tarif impor baru per 7 Agustus mendatang. Meski terakhir diumumkan Indonesia dikenai 19%, tapi lobi-lobi terus dilakukan. Targetnya, ada diskon untuk tarif 10 komoditas.

Menjelang berlakunya tarif resiprosal AS terhadap Indonesia pada 7 Agustus, negosiasi masih terus dilakukan pemerintah Indonesia.

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengakui Indonesia terus bernegosiasi dengan Amerika Serikat (AS) untuk menurunkan tarif impor komoditas Indonesia yang tidak diproduksi di Negeri Paman Sam.

Dia menyatakan proses negosiasi ini diharapkan selesai sebelum 1 September 2025.

"Kami masih dalam proses negosiasi dan berupaya agar tarif bisa turun, terutama untuk produk-produk yang tidak bersaing dengan industri domestik AS. Namun, detail komoditasnya belum bisa diungkap saat ini," kata Budi dalam jumpa pers Kinerja Perdagangan Semester I-2025 di Jakarta, Senin (4/8/2025).

Meski tarif resiprosal sebesar 19 persen ditargetkan berlaku pada 7 Agustus 2025 atau tepat tujuh hari setelah pengumuman kebijakan Presiden Donald Trump, namun Budi optimistis masih ada ruang untuk perubahan.

"Sekarang prosesnya masih berjalan, memang yang resiprosal dapat 19 persen itu berlaku 7 hari setelah 31 Juli. Sekarang proses negosiasi juga masih berjalan sebenarnya, mudah-mudahan sebelum 1 September sudah selesai," ujarnya.

Negosiasi ini berjalan di tengah catatan positif neraca perdagangan Indonesia-AS. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, AS menjadi penyumbang surplus terbesar bagi Indonesia pada Semester I-2025 dengan nilai 9,92 miliar dolar AS.

Kementerian Perdagangan telah mengidentifikasi sepuluh produk ekspor utama Indonesia dan menganalisis kompetitor utama, serta besaran tarif yang dikenakan kepada negara-negara pesaing.

"Jadi upaya terus kita lakukan dan



kita juga sudah mulai menitip dari sepuluh produk ekspor kita, produk utama kita, siapa pesaingnya. Pesaing dari sepuluh produk itu berapa dapat tarif resiprosal?" kata Budi.

### Target Ekspor

Lebih jauh, Kemendag optimistis mencapai target pertumbuhan ekspor Indonesia ke sebesar 7,1 persen pada tahun 2025. Budi menjelaskan bahwa sebelum pemberlakuan kebijakan tarif baru AS, Indonesia sudah mengalami surplus dalam perdagangan dengan Amerika Serikat.

Namun, pemerintah tetap melakukan langkah antisipatif terhadap dinamika pasar Negeri Paman Sam. Indonesia saat ini tidak lagi memulai ekspor dari titik nol karena sudah memiliki posisi tawar yang lebih baik dibandingkan negara pesaing seperti China, Vietnam, dan India, yang justru dikenakan tarif lebih tinggi oleh Amerika Serikat.

"Tetapi ketika kita mau memulai ekspor, kita itu tidak mulai dari start-nya, tidak mulai dari nol lagi," paparnya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS)

## Ekspor ke AS Surplus Rp162 T, Tapi China Defisit

NERACA perdagangan Indonesia kembali mencatatkan hasil positif. Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengungkapkan, pada Juni 2025, Indonesia mencatat surplus sebesar US\$ 4,10 miliar atau setara Rp65,7 triliun (asumsi kurs Rp16.390/US\$). Dengan begitu, tren surplus berlanjut selama 62 bulan berturut-turut sejak Mei 2020.

"Secara kumulatif, neraca perdagangan Indonesia periode semester I-2025 adalah US\$ 19,48 miliar atau lebih tinggi dibandingkan tahun lalu, yaitu US\$ 15,58 miliar," kata Budi dalam konferensi pers di Auditorium Kemendag, Jakarta, Senin (4/8/2025).

Surplus tersebut terdiri dari surplus perdagangan Indonesia sebesar US\$ 28,31 miliar dan defisit perdagangan migas sebesar US\$ 8,83 miliar.

Total ekspor Indonesia selama semester I-2025 tercatat mencapai

US\$ 135,41 miliar atau naik 7,70% secara kumulatif dibanding periode yang sama tahun lalu. Peningkatan ekspor ini ditopang oleh ekspor non-migas yang tumbuh 8,96% menjadi US\$ 128,39 miliar. Sementara ekspor migas justru turun 11,04% menjadi US\$ 7,03 miliar.

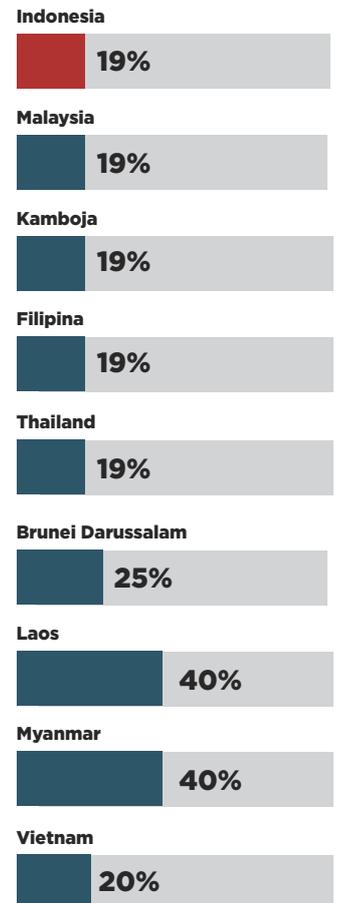
"Kinerja ekspor nasional pada semester I-2025 telah menunjukkan perkembangan yang positif dan menjadi sinyal kuat bagi pencapaian target ekspor tahunan, target ekspor tahunan nasional kita 7,10% dan dalam semester I-2025 ini 7,70%," jelas Budi. Dari sisi negara, Amerika Serikat menjadi penyumbang surplus terbesar bagi Indonesia.

"Kalau kita lihat mitra dagang kita, atau surplus kita tertinggi adalah ke Amerika, yaitu menyumbang surplus yang tertinggi sampai semester 1 ini sebesar US\$

menyebut Amerika Serikat menjadi negara penyumbang surplus neraca perdagangan yang terbesar dengan nilai 9,92 miliar dolar AS pada periode Januari-Juni 2025.

Amerika Serikat menjadi negara penyumbang surplus neraca perdagangan yang terbesar dengan nilai 9,92 miliar dolar AS pada periode Januari-Juni 2025. (wid,rls,ant/dya)

### TARIF TRUMP KE NEGARA ASEAN:



9,92 miliar (atau setara Rp162,6 triliun)," ujarnya.

"Ini pertanda bahwa produk-produk Indonesia masih punya daya saing, meskipun ini belum diberlakukan tarif resiprosal. Jadi nanti kita akan mendorong terus dan kita tentu akan berupaya setelah dilakukan beberapa tarif resiprosal ekspor kita tetap terus meningkat," lanjut Budi. (wid,rls,ist/dya)

# MALANG CREATIVE CENTER DIKOMERSILKAN, DPRD TARGET HASILKAN RP500 JUTA



Gedung Malang Creative Center (MCC). (Santi/Lentera)

**MALANG-** Sebagian ruangan di gedung Malang Creative Center (MCC) mulai diberlakukan tarif retribusi dan sewa sejak 1 Agustus 2025. DPRD Kota Malang menargetkan kebijakan komersialisasi ini mampu menghasilkan pendapatan sebesar Rp500 juta tahun ini, sebagaimana yang diusulkan dalam APBD Perubahan 2025.

"Jadi berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang baru, beberapa ruangan di MCC memang sudah mulai dikenakan tarif retribusi dan sewa. Dalam APBD Perubahan 2025, ditargetkan pendapatan dari komersialisasi ini sebesar Rp500 juta," ujar Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji, dikonfirmasi melalui pesan singkat, Senin (4/8/2025).

Meski begitu, Bayu menegaskan pengelolaan MCC hingga saat ini masih bergantung pada anggaran daerah. Menurutnya, total kebutuhan operasional MCC per tahun mencapai sekitar Rp7,5 miliar, yang sebagian besar masih ditutup melalui APBD Kota Malang.

"Artinya, MCC belum sepenuhnya

mandiri dari sisi pembiayaan. Untuk arah kemandirian MCC ke depan, akan kami bahas lebih lanjut dalam pembahasan Rancangan Perda APBD tahun 2026," katanya.

Bayu juga menyinggung tentang komposisi ruang komersial dan non-komersial di MCC yang sebelumnya sempat diproyeksikan dengan pembagian 60:40. Namun ia menyebut, saat ini dewan akan mengevaluasi lebih lanjut efektivitas kebijakan itu usai pemberlakuan perda baru hingga akhir tahun.

"Kita lihat setelah pelaksanaan perda Agustus sampai dengan Desember, kita evaluasi dari situ untuk menetapkan target selanjutnya," imbuhnya.

Terpisah, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menambahkan pemberlakuan tarif sewa ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selain itu, masukan dari DPRD juga menjadi dasar penyusunan kebijakan pengelolaan MCC ke depan.

Saat ini, menurutnya pengelolaan

MCC masih berada di bawah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag). Meskipun untuk aspek teknis kegiatan ekonomi kreatif (ekraf), ditangani oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar).

Wahyu juga membuka kemungkinan pembentukan dinas ekonomi kreatif tersendiri yang kelak akan menjadi pengelola penuh MCC.

Sementara itu, Kepala Diskopindag Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, menyebutkan beberapa fasilitas di MCC telah ditetapkan sebagai area komersial. Di antaranya adalah hall utama di lantai 2 serta auditorium di lantai 7 yang dapat dipakai untuk konser, workshop, seminar, dan pameran.

"Untuk kegiatan sosial atau pendidikan yang bersifat non komersial, itu dapat mengajukan keringanan," jelas Eko. Ia menambahkan, fasilitas lain seperti Mbois Gym juga dikenakan tarif. Selain itu, MCC juga menyediakan ruang kantor sewa serta booth atau tenant komersial. (Santi/Dya)

## BPHTB JADI ANDALAN KABUPATEN MALANG Diproyeksi Capai Rp200 M di Akhir Tahun

**MALANG** - Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi andalan dalam menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang. Hingga awal Agustus 2025, realisasi penerimaan dari sektor ini telah menembus Rp100 miliar lebih. Ditargetkan bisa mencapai Rp218 miliar hingga akhir tahun.

"Untuk capaian semester pertama tahun ini, BPHTB yang paling besar. Sampai bulan ini, sudah hampir 46 persen dari target," ujar Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Malang, Made Arya Wedanthara, Senin (4/8/2025).

Optimisme juga disampaikan oleh Made terhadap capaian target keseluruhan sektor pajak daerah pada tahun ini. Disebutkannya, pada tahun anggaran 2024 lalu, realisasi pajak bahkan melampaui target dengan surplus sebesar Rp50 miliar.

IHarapannya, tahun ini minimal bisa sesuai target. Kami selalu optimistis," imbuhnya.

Demi percepatan capaian,

pihaknya juga terus melakukan berbagai upaya jemput bola ke masyarakat. Salah satunya melalui program Bapenda Menyapa Warga, di mana petugas turun langsung ke lapangan untuk mendorong kesadaran wajib pajak.

Lebih lanjut, Made menyampaikan, pihaknya juga memperluas akses kanal pembayaran pajak, termasuk melalui seluruh bank mitra, mini-market, serta platform e-commerce. Tak hanya itu, pembayaran pajak juga bisa dilakukan secara non-tunai menggunakan sistem Quick Response Code Indonesian Standard, sebagaimana dorongan dari Bank Indonesia.

"Sekarang kanal pembayaran sudah banyak. Jadi kami minta warga tidak perlu menitipkan pembayaran kepada orang lain," katanya.

Secara keseluruhan, dari 12 kategori pajak daerah yang dikelola, disebutkan realisasi pendapatan hingga awal Agustus 2025 telah mencapai Rp395,4 miliar. Angka itu setara 54,38 persen dari total target

pendapatan pajak daerah tahun ini yang ditetapkan sebesar Rp727,2 miliar.

Setelah BPHTB, Made mengatakan kategori penerimaan terbesar kedua datang dari opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) yang telah menyumbang Rp90,1 miliar atau 57,32 persen dari target Rp157,3 miliar.

Sementara itu, untuk kategori pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) dari tenaga listrik, realisasi mencapai Rp71,8 miliar atau 56,11 persen dari target Rp128,1 miliar. Pajak bumi dan bangunan (PBB) menyumbang Rp60,9 miliar atau 53,73 persen dari target Rp113,5 miliar.

Sedangkan untuk realisasi bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) mencapai Rp38,9 miliar atau 63 persen dari target Rp61,7 miliar. Sementara PBJT makanan dan minuman telah terkumpul Rp12,8 miliar atau 70,67



(Ilustrasi) Area persawahan di wilayah Junrejo, menjadi kawasan pertanian terbesar di Kota Batu. (Santi/Lentera)

persen dari target Rp18,2 miliar.

Penerimaan dari PBJT jasa kesenian dan hiburan tercatat Rp5,4 miliar atau 69,33 persen dari target Rp7,8 miliar. Untuk PBJT jasa hotel sebesar Rp5,06 miliar atau 67,40 persen dari target Rp7,5 miliar. Serta pajak air tanah mencapai Rp4,6 miliar atau 69,38 persen dari target Rp6,6 miliar. (Santi/Dya)



Tentara Korea Selatan sedang bekerja di pengeras suara yang dipasang untuk siaran propaganda selama latihan militer di dekat zona demiliterisasi yang memisahkan kedua Korea di Paju, Korea Selatan, dalam gambar selebaran yang disediakan oleh Kementerian Pertahanan dan dirilis pada 9 Juni 2024. (Foto: Reuters)

## Redakan Ketegangan dengan Korut

# KORSEL COPOT SPEAKER PROPAGANDA

Pemerintah Korea Selatan mulai membongkar speaker atau pengeras suara propaganda yang selama ini digunakan untuk menyiarkan berita dan musik K-pop di wilayah perbatasan dengan Korea Utara. Tindakan ini mencerminkan komitmen pemerintahan baru Korsel untuk meredakan ketegangan dengan negara tetangganya itu.

**S**ecara teknis, Korea Utara dan Korea Selatan masih berada dalam status perang karena Perang Korea yang berlangsung pada 1950-1953 berakhir dengan kesepakatan gencatan senjata, bukan melalui perjanjian damai resmi.

Militer Korsel dalam pernyataannya, dikutip dari AFP, Senin (4/8/2025), menyebut kedua negara telah menghentikan siaran propaganda di area perbatasan, tepatnya di sepanjang zona demiliterisasi setelah terpilihnya Presiden Lee Jae Myung dalam pemilu awal Juni lalu.

Disebutkan oleh militer Korsel, pada Juni lalu, bahwa Pyongyang telah berhenti menyiarkan suara-suara aneh dan meresahkan di sepanjang perbatasan, yang selama ini menjadi gangguan besar bagi penduduk lokal Korsel, sehari setelah speaker Korsel tidak lagi berfungsi.

"Mulai hari ini, militer telah mulai mencopot pengeras suara," ucap juru bicara Kementerian Pertahanan Korsel, Lee Kyung Ho, kepada wartawan pada Senin (4/8/2025) waktu setempat.

"Ini adalah langkah praktis yang bertujuan untuk membantu meredakan ketegangan dengan Korea Utara, asalkan tindakan tersebut tidak membahayakan kesiapan militer," imbuhnya.

Lee mengatakan bahwa semua pengeras suara yang dipasang di sepanjang perbatasan kedua Korea akan dibongkar pada akhir minggu ini. Namun dia tidak mengungkapkan jumlah pasti pengeras suara yang dibongkar.

Presiden Lee Jae Myung telah memerintahkan militer Korsel untuk menghentikan siaran propaganda di perbatasan dalam upaya untuk "memulihkan kepercayaan".

Hubungan antara kedua Korea berada di salah satu titik terendah dalam beberapa tahun terakhir, dengan Seoul mengambil sikap keras terhadap Pyongyang, yang semakin dekat dengan Moskow setelah invasi

militer Rusia ke Ukraina.

Pemerintah Korsel sebelumnya memulai siaran propaganda di perbatasan sejak tahun lalu sebagai tanggapan atas rentetan balon berisi sampah yang diterbangkan ke selatan oleh Korut.

Namun, Presiden Lee Jae Myung berkomitmen untuk membangun kembali hubungan dengan Korea Utara dan menurunkan ketegangan di kawasan Semenanjung Korea.

Terlepas dari upaya diplomatik Korsel, Korut menolak untuk berdialog dengan negara tetangganya itu.

"Jika ROK (Republik Korea-nama resmi Korsel)... berharap dapat membalikkan semua hasil yang telah dicapainya hanya dengan beberapa kata sentimental, tidak ada kesalahan perhitungan yang lebih serius daripada itu," tegas Kim Yo Jong, adik perempuan pemimpin Korut Kim Jong Un, pekan lalu.

Presiden Lee Jae Myung mengatakan dirinya akan mengupayakan perundingan dengan Korut tanpa prasyarat, menyusul pembekuan yang mendalam di bawah pendahulu-nya. (AFP, Reuters, ist/nei)

### PERMUSUHAN KORSEL DAN KORUT

- **Asal-Usul**  
Berawal dari pembagian Korea pasca Perang Dunia II dan Perang Korea (1950-1953) yang hanya berakhir gencatan senjata.
- **Insiden**  
Hubungan tegang akibat berbagai serangan, termasuk upaya pembunuhan, pengeboman, dan serangan militer.
- **Ancaman Nuklir**  
Korea Utara mengembangkan senjata nuklir dan rudal balistik yang mengancam kawasan.
- **Keterlibatan Global**  
AS mendukung Korea Selatan, sedangkan Tiongkok dan Rusia mendukung Korea Utara, memperumit konflik.



Di tengah situasi ini, pemerintah Korea Selatan mengambil langkah-langkah diplomatik lain. Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Cho Hyun membahas aliansi Korea Selatan-Amerika Serikat (AS), isu Korea Utara, dan keamanan global dengan para senator AS dan pejabat Gedung Putih selama kunjungannya ke Washington.

Menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, Cho bertemu dengan Senator Partai Republik Bill Hagerty dan Pete Ricketts, yang menjabat sebagai ketua Subkomite Asia Timur di bawah Komite Hubungan Luar Negeri pada Jumat (01/08/2025) lalu. Ia juga melakukan pembicaraan via telepon dengan Senator Republik Dan Sullivan. (The Korea Herald, The Washington Post, ist/nei)

## Generasi Muda Tak Lagi Prioritaskan Reunifikasi

**GENERASI** muda Korea Selatan kini makin tak peduli pada ide reunifikasi dengan Korea Utara, yang mereka anggap sebagai beban ekonomi dan kurang relevan secara politik. Pandangan ini bergeser meski pendekatan antar-Korea telah diupayakan sejak berakhirnya Perang Korea pada 1953.

Sejarah mencatat beberapa upaya untuk rekonsiliasi. Pada tahun 1972, terjadi komunikasi bersama di bawah Presiden Korea Selatan Park Chung-hee yang menjanjikan reunifikasi damai, tetapi upaya ini gagal karena ketidakpercayaan. Di tahun 1990-an, Perjanjian Dasar 1992 juga mengalami kebuntuan di tengah kekhawatiran atas program nuklir Korea Utara yang terus berkembang.

Titik terang sempat muncul melalui "Kebijakan Sinar Matahari" yang diluncurkan pada tahun 1998 oleh Presiden Kim Dae-jung. Kebijakan ini menghasilkan pertemuan puncak antar-Korea pertama pada tahun 2000, serta perluasan kerja sama ekonomi dan

pariwisata. Bahkan, keluarga yang terpisah sejak Perang Korea bisa kembali bersatu. Namun, momentum ini menurun drastis setelah tahun 2008, saat pemerintahan konservatif di Seoul mengubah arah kebijakan, ditambah dengan tantangan baru seperti pandemi COVID-19 dan perluasan program senjata Pyongyang.

Menurut Sarah Son, seorang dosen senior Studi Korea di Universitas Sheffield, kekecewaan yang berulang kali ini telah mengikis kepercayaan publik. "Warga Korea Selatan telah berkali-kali disuguhi visi rekonsiliasi yang penuh harapan, hanya untuk kemudian menghadapi kekecewaan," ujarnya. Son menambahkan bahwa generasi muda saat ini tidak lagi menganggap reunifikasi sebagai cita-cita karena mereka tidak memiliki ingatan langsung tentang Perang Korea. Mereka juga lebih realistis dalam mempertimbangkan biaya yang akan sangat besar untuk memodernisasi ekonomi dan infrastruktur Korea Utara agar setara dengan standar Korea Selatan.



# Melukis Bantu Redakan Emosi dan Stres

**S**uasana hati merupakan bagian penting dari kesehatan mental, namun sayangnya sering kali berubah tanpa bisa diprediksi. Ada kalanya kita merasa bahagia dan tenang, namun di lain waktu bisa juga diliputi rasa sedih, gelisah, atau lesu. Kondisi emosional yang naik turun ini adalah hal yang wajar sebagai manusia, namun yang menjadi tantangan adalah bagaimana kita meresponsnya secara sehat saat mood sedang tidak stabil.

Salah satu cara sederhana namun efektif untuk menjaga keseimbangan emosi dan mendukung kesehatan mental adalah dengan melukis. Aktivitas ini tidak menuntut keahlian khusus, karena yang terpenting adalah kemampuan mengekspresikan apa yang dirasakan.

## Melukis Sebagai Alat Komunikasi

Mengungkapkan perasaan tidak selalu harus melalui kata-kata. Lukisan pun bisa menjadi media yang kuat untuk menyampaikan apa yang sedang kita rasakan. Coretan garis, simbol-simbol tertentu, hingga pemilihan warna cat memiliki makna tersendiri yang mencerminkan emosi dan kondisi batin seseorang. Setiap goresan pada kanvas bisa menjadi bahasa visual yang merepresentasikan pikiran dan hati kita secara mendalam.

Berbicara melalui lukisan juga menjadi bentuk ekspresi yang paling

jujur, karena tidak ada batasan atau ketakutan akan penilaian dari orang lain. Dalam proses melukis, seseorang bebas mengekspresikan dirinya tanpa harus mengikuti aturan atau standar tertentu.

## Melukis Bentuk Penyembuhan Diri

Tanpa disadari, melukis dapat menjadi cara untuk kembali mengenal diri sendiri dan memahami apa yang benar-benar kamu inginkan dalam hidup. Proses kreatif yang mengalir dari kedua tanganmu bukan sekadar menghasilkan gambar, tapi juga merefleksikan kekuatan dan kelemahan dalam dirimu—mulai dari bagaimana kamu merespons kritik, bertahan dalam kesulitan, hingga kemampuan untuk melepaskan sesuatu yang tak bisa dikendalikan.

Menjalani hobi seperti melukis bisa terasa seperti menghirup udara segar di tengah rutinitas yang padat. Ada kebebasan yang tak ternilai saat kamu melakukan sesuatu hanya karena kamu ingin, bukan karena harus.

## Tempat Untuk Mengekspresikan Diri

Saat kamu melukis, perlahan-lahan kamu akan menyadari apa yang sebenarnya sedang dirasakan dan diinginkan oleh diri sendiri. Melalui warna, garis, dan bentuk yang kamu tuangkan di atas kanvas, suasana hati yang tersembunyi bisa muncul ke

permukaan. Terkadang, perasaan bersalah muncul karena kamu merasa tidak cukup produktif atau tidak melakukan apa-apa, dan itu membuat energi dalam dirimu menjadi berat dan negatif. Di saat seperti itulah melukis bisa menjadi alat untuk membalikkan energi tersebut. Dengan menyalurkan emosi ke dalam karya, kamu mengubah rasa bersalah menjadi ekspresi yang jujur dan bermakna.

## Mengontrol Suasana Hati

Memiliki suasana hati yang baik tentu sangat penting untuk mendukung kelancaran dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Salah satu cara sederhana namun efektif untuk mengontrol mood adalah dengan menggambar, terutama menggunakan metode doodling dan mewarnainya. Aktivitas ini bisa dilakukan kapan saja, tanpa membutuhkan keahlian khusus, dan justru memberi ruang bagi ekspresi bebas tanpa tekanan.

Manfaat dari menggambar dan mewarnai telah dibuktikan melalui berbagai studi. Salah satunya menunjukkan bahwa kegiatan ini mampu menjadi media penyaluran emosi negatif yang sehat. Dengan menuangkan perasaan ke dalam bentuk visual, emosi tidak lagi terpendam dan dapat dikelola dengan lebih baik. Hasilnya, suasana hati pun cenderung menjadi lebih tenang

## Meningkatkan Problem Solving

Kemampuan memecahkan masalah atau problem solving merupakan keterampilan penting yang sangat dibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan kemampuan ini, seseorang dapat menemukan solusi yang tepat dan efisien dalam menghadapi tantangan atau hambatan, baik dalam pekerjaan maupun kehidupan pribadi. Problem solving juga membantu meningkatkan daya pikir kritis dan pengambilan keputusan yang lebih bijak.

## Meningkatkan Daya Ingat

Menggambar dengan metode doodling ternyata tidak hanya bermanfaat untuk relaksasi, tetapi juga dapat membantu mempertajam memori dan meningkatkan daya ingat, terutama jika dilakukan dalam batasan waktu tertentu. Namun, penting untuk tetap bijak dalam melakukannya agar tidak sampai larut dalam aktivitas menggambar hingga mengabaikan tugas atau tanggung jawab lainnya.

Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa melakukan doodling selama 30 menit dapat secara signifikan melatih konsentrasi dan daya ingat. Aktivitas ini membantu otak tetap aktif dan fokus, terutama ketika dilakukan sambil mendengarkan informasi atau dalam situasi yang membutuhkan perhatian. (nei,ist/dya)

# CHOICEJACKING ANCAM ANDROID & IPHONE, JANGAN NGECHAS SEMBARANGAN!

**F**asilitas pengisian daya gratis kini umum ditemukan di tempat-tempat publik seperti bandara dan pusat perbelanjaan. Namun, kamu perlu berhati-hati saat menggunakan layanan tersebut, karena ada ancaman serangan siber baru yang memanfaatkan kabel charger sebagai jalurnya.

Menurut laporan terbaru dari NordVPN mengungkap bahwa pelaku kejahatan siber kini memanfaatkan metode serangan baru yang disebut choicejacking, di mana mereka dapat mencuri data dari ponsel korban melalui perangkat yang tampak seperti charger biasa namun sebenarnya telah dimodifikasi.

Dengan metode baru ini, perangkat berbahaya yang terlihat seperti stasiun pengisian daya atau port charger biasa dapat memanipulasi berbagai fungsi di ponsel. Misalnya, kabel yang harusnya hanya untuk mengisi daya bisa dimanipulasi untuk transfer data hingga memungkinkan sistem atau perangkat internal untuk mengakses data dan pengaturan di ponsel.

Begitu koneksi berhasil terhubung, perangkat milik pelaku kejahatan siber dapat dengan mudah mengakses dan mencuri berbagai data pribadi pengguna, seperti foto, dokumen, kontak, hingga informasi sensitif lainnya yang tersimpan di ponsel.

"Choicejacking  
sangat

berbahaya karena dapat memanipulasi perangkat untuk membuat keputusan yang tidak pernah diinginkan pengguna - tanpa mereka sadari," kata Adrianus Warmenhoven, penasihat keamanan siber NordVPN dalam laporannya, seperti dikutip dari ZDNet, Minggu (3/8/2025).

"Baik itu memberikan akses ke data atau mengunduh malware, serangan ini mengeksploitasi kepercayaan yang kita berikan dalam interaksi sehari-hari dengan ponsel kita," sambungnya.

Choicejacking merupakan evolusi dari serangan serupa bernama juicejacking. Lewat metode juicejacking, hacker menginstal software di pusat pengisian daya di

bandara atau tempat publik lainnya yang dapat menyedot data dari ponsel secara otomatis.

Vendor ponsel sebenarnya sudah berhasil mengembangkan cara untuk mencegah serangan juicejacking. Namun dalam laporan terbaru, peneliti dari Graz University of Technology di Austria menemukan cara untuk membobol perlindungan terhadap serangan juicejacking.

Perangkat berbahaya dapat meniru perangkat input USB atau Bluetooth untuk mengaktifkan mode transfer data. Serangan ini dapat menyerang ponsel Android dan iOS. Taktik ini menggunakan

metode seperti injeksi keystroke dan penyalahgunaan protokol untuk menyelesaikan transfer data hanya dalam 133 milidetik.

Untuk menghindari serangan choicejacking, NordVPN menyarankan pengguna Android dan iPhone untuk selalu menginstal sistem operasi dan update keamanan terbaru. Kalau harus mengisi daya di tempat umum, sebaiknya gunakan charger sendiri dan gunakan outlet AC standar.

Sebisa mungkin jangan mengecas ponsel menggunakan port USB di pusat pengisian daya di tempat umum. Kalau memungkinkan, pastikan ponsel hanya menggunakan mode 'charge only' untuk menghindari transfer data yang tidak diinginkan. (nei,ist/dya)



HARIAN  
**LENERA**  
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENERA TODAY"  
**PIMPINAN PERUSAHAAN** TARMUJI TALMACSI  
**OMBUDSMAN** SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)  
**PENANGGUNG JAWAB** ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)  
**PIMPINAN REDAKSI** ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)  
**REDAKTUR PELAKSANA** AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)  
**REDAKTUR** LUTFIYU HANDI, NEISKA OLIVIANA (CO)

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY  
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)  
download edisi digital pada web  
[www.lenteratoday.com](http://www.lenteratoday.com)  
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS  
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



**BIRO: SURABAYA:** YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO | **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) | **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH | **LAMONGAN:** L HANDI | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **KEDIRI:** GATOT SUNARKO | **JOMBANG :** SUTONO | **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO :** IMAN SANTOSO | **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO | **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO ( SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) | **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. | **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN | **TRENGGALEK:** TINA W | **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO | **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN | **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN | **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

**PENASEHAT HUKUM** DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN | **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILAH | **DESAIN GRAFIS** PAULUS IVAN | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | **TELP IKLAN** 031-87854491 | **INIB** 91205006801134 | **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

**MEDIA TERVERIFIKASI**

# Tanpa Disadari, Kebiasaan Sepele Ini Percepat Penuaan

**M**enua adalah proses alami yang tidak bisa dihindari dan akan dialami oleh setiap manusia. Namun, tidak sedikit orang terutama perempuan yang merasa cemas menghadapi penuaan, terlebih jika tanda-tandanya muncul lebih cepat dari seharusnya. Penampilan yang berubah seiring waktu kerap menjadi sumber kekhawatiran karena dianggap mencerminkan usia dan kesehatan.

Tanda-tanda penuaan biasanya mulai terlihat saat memasuki usia 30-an. Meski begitu, proses ini bisa terjadi lebih awal jika seseorang terbiasa melakukan kebiasaan buruk yang berdampak negatif pada kulit dan tubuh. Maka dari itu, selain rutin menggunakan produk perawatan kulit seperti skincare anti-aging, penting juga untuk memperbaiki gaya hidup agar penuaan tidak datang terlalu dini.

## Mengandalkan SPF dari Makeup

Melindungi kulit dari penuaan dini tak bisa dilepaskan dari peran SPF. Paparan sinar ultraviolet (UV) yang berlebihan dapat merusak kolagen dan elastin, dua zat penting yang menjaga kekencangan dan elastisitas kulit. Akibatnya, kulit bisa mengalami kerutan, menjadi kendur, hingga muncul hiperpigmentasi yang membuat wajah tampak lebih tua dari usia sebenarnya. Karena itu, penggunaan sunscreen secara rutin setiap hari sangat dianjurkan.

## Tidur Tanpa Menghapus Makeup

Tidur tanpa membersihkan makeup terlebih dahulu bisa mempercepat proses penuaan kulit. Hal ini terjadi karena makeup yang menempel semalaman akan menyumbat pori-pori dan menghambat proses regenerasi alami kulit. Akibatnya, kulit bisa menjadi meradang, timbul jerawat, dan tampak kusam—tanda-tanda penuaan dini yang sering kali tak disadari.

Perlu diingat, membersihkan makeup tidak cukup hanya dengan

menggunakan face wash. Untuk memastikan wajah benar-benar bersih, sebaiknya awali dengan produk pembersih seperti micellar water, cleansing balm, atau cleansing oil. Langkah ini membantu mengangkat sisa makeup dan kotoran secara menyeluruh sebelum mencuci wajah, sehingga kulit tetap sehat dan terawat.

## Minum Pakai Sedotan

Meski sedotan bisa membantu mencegah noda pada gigi, penggunaannya secara berulang justru dapat memicu munculnya garis-garis halus di sekitar mulut. Hal ini disebabkan oleh gerakan mengecurut yang terus-menerus saat minum dengan sedotan, yang lama-kelamaan bisa memengaruhi elastisitas kulit di area tersebut. Walau dampaknya mungkin tidak langsung terlihat secara drastis, kebiasaan ini tetap bisa mempercepat tanda-tanda penuaan jika dilakukan terlalu sering.

## Sering Mengecek Mata

Sering mengecek mata ternyata bisa berdampak buruk bagi penampilan, khususnya di area sekitar mata. Kebiasaan ini dapat menyebabkan munculnya lingkaran hitam dan garis-garis halus karena tekanan berulang yang diberikan pada kulit tipis di sekitar mata. Selain itu, gesekan yang terjadi saat mengecek dapat merusak pembuluh darah halus dan mempercepat kerusakan jaringan kulit.

Kantung mata juga bisa terbentuk akibat otot-otot di area tersebut

melemah, yang diperparah oleh kebiasaan mengucek mata. Untuk menjaga area mata tetap sehat dan tampak segar, sebaiknya hindari kebiasaan ini dan berikan perawatan ekstra seperti menggunakan eye cream serta memastikan tidur cukup setiap malam.

## Tidak Cukup Tidur

Tidur bukan hanya penting untuk memulihkan energi dan fokus, tetapi juga berperan besar dalam menjaga kesehatan kulit. Saat malam hari, kulit memasuki fase regenerasi, di mana sel-sel kulit memperbaiki diri setelah terpapar polusi, sinar UV, dan stres sepanjang hari. Jika waktu tidur kurang, proses regenerasi ini bisa terganggu, yang pada akhirnya berdampak negatif pada penampilan kulit.

Sebuah studi menunjukkan bahwa tidur hanya selama tiga jam selama dua malam berturut-turut dapat menyebabkan berbagai masalah kulit. Kulit menjadi lebih kering, kehilangan elastisitas, tampak kusam, dan lingkaran hitam di bawah mata mulai terlihat jelas.

## Terlalu Sering Pakai Headphone

Menggunakan headphone terlalu lama bisa memberikan tekanan berlebih pada sistem pendengaran. Saat telinga terus-menerus menerima suara dari jarak dekat, terutama dalam volume tinggi, saraf pendengaran harus bekerja ekstra keras. Kebiasaan ini tidak

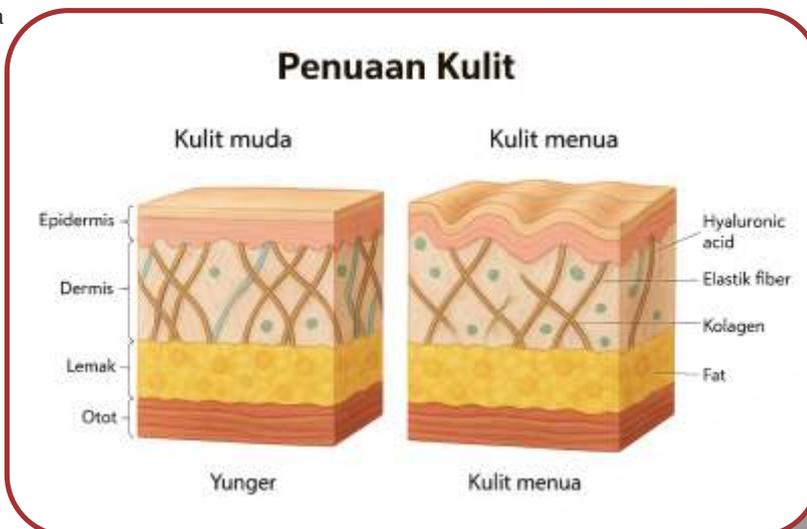
hanya berisiko merusak pendengaran, tetapi juga dapat mempercepat kelelahan pada telinga dan otak.

Selain itu, stimulasi suara yang konstan dari headphone membuat otak kesulitan untuk benar-benar beristirahat, terutama jika digunakan tanpa jeda dalam aktivitas sehari-hari.

## Duduk Sepanjang Hari

Pekerja kantor yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk duduk dan jarang bergerak cenderung lebih rentan mengalami penuaan dini. Kurangnya aktivitas fisik membuat tubuh kehilangan stimulus penting yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan secara keseluruhan. Padahal, bergerak secara teratur dapat mengirimkan sinyal anti-aging yang kuat ke tubuh, membantu memperlambat kerusakan sel, serta menjaga fungsi otak dan sistem kardiovaskular tetap optimal.

Untuk meminimalkan risiko tersebut, penting membiasakan diri untuk aktif meski dalam rutinitas kerja. Salah satu cara sederhana adalah dengan berdiri setiap 30 menit sekali saat duduk dalam waktu lama, dan berjalan kaki sejenak setelah makan. (nei,ist/dya)



## Utang Pinjol (dari Hal 1) ...

**A**gusman menegaskan bahwa OJK terus menguatkan pengawasan melalui kunjungan langsung, optimalisasi perlindungan konsumen, serta pengawasan pasca pencabutan izin usaha dan proses likuidasi.

Tak hanya itu, OJK juga melakukan peninjauan ulang terhadap proses PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) dan fit and proper test terhadap manajemen fintech yang terlibat pelanggaran. Dalam beberapa kasus, OJK bahkan melaporkan temuan pelanggaran hukum kepada aparat penegak hukum.

"Langkah ini juga dibarengi dengan penguatan regulasi untuk membentuk industri pinjol yang sehat dan akuntabel," ujarnya dalam Rapat Dewan Komisioner (RDK) Bulanan OJK, dilansir antara Senin (4/8/2025).

Selain itu, OJK mengungkapkan ada 4 dari 145 perusahaan pembiayaan yang belum memenuhi ketentuan modal minimal Rp 100 miliar, dan 11 dari 96 perusahaan peer to peer lending (P2P Lending) yang belum memenuhi ekuitas minimal Rp 7,5 miliar. "Dari 11 penyelenggara tersebut, lima yang telah menyampaikan action plan," ungkap Agusman.

OJK mengungkapkan pihaknya terus mengawasi action plan baik untuk melaksanakan merger, injeksi modal atau melakukan peninjakan dengan calon investor strategis, baik dari lokal maupun asing.

Sepanjang bulan Juni 2025, OJK juga sudah mengenakan sanksi administrasi kepada 19 perusahaan pembiayaan, 3 perusahaan modal ventura, dan 30 perusahaan p2p lending atas pelanggaran terhadap POJK yang berlaku termasuk pengawasan tindak lanjut pemeriksaan.

Sementara itu, hingga bulan Juni 2025, pembiayaan pinjol tumbuh 25,06% dengan nilai outstanding mencapai Rp 83,52 triliun. Pertumbuhan ini tercatat mengalami perlambatan, namun tidak sebesar yang dialami oleh industri multifinance secara lebih luas.

Pembiayaan multifinance sendiri tercatat hanya mampu tumbuh 1,96% dengan outstanding mencapai Rp 501,83 triliun. Pertumbuhan ini melambat signifikan dibandingkan dengan catatan tahun lalu yang mampu tumbuh dua digit. Sementara itu, tingkat kredit macet pinjol (TWP90) tercatat mengalami perbaikan. Tingkat TWP90 berada di level 2,85% per Juni 2025, dibandingkan pada Mei sebesar 3,19%," terang Agusman.

Selain itu, Kepala Eksekutif

Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widayarsi Dewi menyampaikan OJK telah mengantongi sebanyak 8.929 pengaduan mengenai pinjaman online ilegal. Kemudian, OJK melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (PASTI) juga telah menghentikan 1.556 entitas pinjol ilegal.

Secara keseluruhan, Friderica atau yang akrab disapa Kiky ini bilang, pihaknya mengantongi sebanyak 11.137 pengaduan terkait entitas ilegal periode Januari s.d 24 Juli 2025. Angka tersebut terdiri atas pengaduan tentang pinjol ilegal hingga investasi ilegal.

"Kami telah menerima 11.137 pengaduan terkait entitas ilegal. Dari total pengaduan tersebut 8.929, pengaduan mengenai pinjaman online (pinjol) ilegal dan 2.208 pengaduan terkait investasi ilegal," ujar Kiky, dikutip detik, Senin (4/8/2025).

Selain menemukan dan menghentikan 1.556 entitas pinjol ilegal, Satgas PASTI juga telah menghentikan 284 penawaran investasi ilegal di sebuah situs dan aplikasi yang berpotensi merugikan masyarakat. "Satgas PASTI juga menemukan dan telah mengajukan pemblokiran terhadap 2.422 nomor kontak kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi)," ujar Kiky.

Satgas PASTI juga memonitor laporan penipuan yang disampaikan masyarakat kepada Indonesia Anti Scam Center (IASC) dan menemukan sebanyak 22.993 nomor telepon yang diduga terkait penipuan. Pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Komdigi.

Untuk diketahui, sejak peluncurannya di 22 November tahun lalu, IASC telah menerima 204.011 laporan. Angka tersebut terdiri dari 129.793 laporan disampaikan oleh para korban melalui Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), selebihnya juga dilaporkan kepada IASC sebesar 74.218 laporan.

Sementara itu, Komisi XI DPR RI mendukung penuh terhadap langkah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menindak dugaan praktik kartel suku bunga di industri layanan pinjaman daring atau financial technology lending (fintech lending) atau yang lebih dikenal dengan nama pinjol ini.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro, mengatakna bahwa penindakan tegas KPPU merupakan langkah penting dalam menjaga prinsip persaingan usaha yang sehat di sektor keuangan digital. Ia menyebut praktik kartel, jika terbukti, merupakan bentuk

pelanggaran serius yang merugikan masyarakat luas, khususnya kalangan menengah ke bawah yang menjadi sasaran utama layanan pinjol.

"Kami mengapresiasi keberanian KPPU. Sepanjang proses dilakukan sesuai prinsip due process of law dan didukung alat bukti kuat, maka tindakan ini harus didukung penuh," kata Fauzi dalam pernyataannya dikutip sindonews, Minggu (3/8/2025).

Dia juga melibat bahwa beban bunga dan denda yang dialami oleh masyarakat masih cukup tinggi, meski OJK telah membatasi bunga harian maksimal pinjaman daring sebesar 0,3 persen. Namun, lanjutnya, praktik di lapangan menunjukkan akumulasi biaya pinjaman yang tetap memberatkan, terutama untuk tenor pendek.

Untuk itu, Komisi XI DPR menilai perlunya evaluasi menyeluruh terhadap struktur bunga dan denda pada pinjaman daring. Selain penguatan pengawasan, perlu transparansi dalam penyajian bunga tahunan efektif (effective annual rate), serta edukasi publik agar masyarakat tidak terjerat pinjaman di luar kemampuan finansial mereka.

"Industri ini tidak boleh berkembang menjadi jebakan utang digital yang sistemik karena praktik kartel. Etika bisnis dan tanggung jawab sosial harus menjadi komitmen utama pelaku industri," tegas Fauzi.

Dia menambahkan, koordinasi antar-lembaga seperti OJK, KPPU, dan aparat penegak hukum harus diperkuat agar pengawasan terhadap industri ini berjalan efektif dan menyeluruh. Komisi XI juga berkomitmen mendorong penguatan regulasi dan pengawasan di sektor jasa keuangan dengan menitikberatkan pada perlindungan konsumen dan keadilan ekonomi. Evaluasi terhadap ketentuan bunga harian maksimal menjadi salah satu agenda penting dalam pembahasan ke depan.

Sebagai informasi, KPPU dijadwalkan menggelar sidang perdana pada 14 Agustus 2025 terkait dugaan kartel bunga pinjaman daring. Sebanyak 97 penyelenggara fintech lending ditetapkan sebagai terlapor karena diduga menetapkan plafon bunga secara bersama melalui kesepakatan internal dalam asosiasi industri, yakni Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).

Kemudian, KPPU mengungkap, para terlapor sebelumnya menyepakati tingkat bunga harian maksimal 0,8 persen, yang kemudian diturunkan menjadi 0,4 persen pada 2021. Sidang perdana akan digunakan untuk memeriksa validitas bukti awal dan membuka proses pembuktian lebih lanjut.

Jika terbukti melanggar, para

pelaku usaha terancam dikenakan sanksi administratif. Denda yang dapat dijatuhkan mencapai 50 persen dari keuntungan yang diperoleh selama pelanggaran, atau maksimal 10 persen dari total penjualan di pasar bersangkutan selama periode pelanggaran terjadi.

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKB, Tommy Kurniawan, menyoroti maraknya gerakan gagal bayar (galbay) pinjol yang semakin tersebar luas di media sosial. Dia mendesak OJK untuk turun tangan mengatasi masalah tersebut.

Tommy menilai fenomena ini berpotensi mengganggu stabilitas industri fintech lending legal dan merugikan ekosistem pinjol yang sudah diawasi dan diatur secara resmi oleh OJK. Gerakan semacam itu tidak boleh dibiarkan.

Menurut Tommy, gerakan galbay bukan hanya mencoreng kepercayaan publik terhadap sistem keuangan digital, tetapi juga mengancam kelangsungan bisnis pinjol legal yang telah menjalankan operasional sesuai aturan.

"Gerakan gagal bayar ini sangat merugikan penyelenggara pinjaman online yang sudah berizin resmi dari OJK. Ini bisa membuat investor kehilangan kepercayaan dan berdampak sistemik terhadap industri fintech yang sedang berkembang," tegas Tommy dalam keterangan tertulisnya.

Ketua Umum DKN Garda Bangsa itu meminta OJK untuk segera mengambil langkah konkret guna mengantisipasi dampak meluas dari gerakan ini. Ia mendorong OJK melakukan pendekatan edukatif dan represif secara seimbang untuk menjaga ketertiban di sektor pinjaman online.

"Kami mendesak OJK untuk segera turun tangan. Selain menindak pinjol ilegal yang masih marak, perlu juga ada langkah tegas terhadap pihak-pihak yang menyebarkan gerakan galbay secara massif dan terorganisir. Ini bisa dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum," tambahnya.

Politikus asal Dapil Jawa Barat V ini juga menekankan pentingnya edukasi keuangan digital kepada masyarakat, khususnya generasi muda, agar memahami hak dan kewajiban sebagai peminjam. Ia menyayangkan masih banyaknya masyarakat yang mengakses pinjol tanpa memahami risiko serta kewajiban pengembalian dana.

"Kita perlu gencarkan literasi keuangan. Masyarakat harus tahu bahwa meminjam berarti juga bertanggung jawab untuk membayar. Jangan sampai perilaku tidak bertanggung jawab ini menjadi budaya yang merusak," pungkas Tommy.(rls,ant,ist/lut)

# MENSESNEG : BELUM ADA PEMBICARAAN KURSI MENTERI UNTUK PDIP

Menanggapi instruksi Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri yang meminta kadernya mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Mensesneg Prasetyo Hadi mengaku belum ada pembicaraan soal kursi menteri terkait sikap Megawati itu.



Mensesneg Prasetyo Hadi.

**B**elum ada pembicaraan ke sana (kursi menteri untuk PDIP)," kata Prasetyo di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/8/2025).

Prasetyo mengatakan mendukung tak berarti harus berada di dalam pemerintahan. Menurut dia, posisi PDIP sebagai penyeimbang merupakan hal yang baik.

"Mendukung kan tidak selalu harus bergabung di dalam pemerintahan. Apa yang disampaikan Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati, di dalam Kongres PDI Perjuangan, dengan menjadi penyeimbang pemerintah, itu juga sesuatu yang baik. Tidak ada salahnya," ujarnya.

"Memang pemerintah juga butuh check and balance, butuh masukan, butuh penyeimbang. Tidak ada masalah," sambung dia.

Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri menegaskan partainya tak memosisikan diri sebagai oposisi atau berkoalisi. Megawati mengatakan partainya akan mendukung kebijakan pemerintah selama berpihak kepada rakyat.

Megawati mengatakan demokrasi Indonesia bukan merupakan demokrasi bersifat blok-blok kekuasaan. Namun dia mengatakan demokrasi Indonesia bertumpu pada kedaulatan rakyat dan konstitusi.

"Oleh karena itu, PDIP tidak memosisikan sebagai oposisi dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan," ujarnya.

"Kita adalah partai ideologis, yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang, demi menjaga arah pembangunan nasional tetap berada di dalam rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak," sambung dia.

Sementara itu, Eks Sekretaris Jenderal (Sekjen) yang kini menjabat sebagai Ketua Dewan Kehormatan Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengaku bahwa sikap PDIP telah disampaikan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dalam pertemuan dengannya. Menurut Megawati, kata

Muzani, pemerintah harus didukung agar program-program tetap berjalan efektif.

"Ibu Mega dalam banyak kesempatan ketemu kami juga seperti itu, bahwa pemerintah hasil pemilihan umum ini harus didukung supaya pemerintah memiliki efektivitas dalam menjalankan kekuasaannya," kata Muzani dilansir cnnindonesia, Minggu (3/8/2025).

Muzani juga bersyukur dan berterima kasih atas dukungan yang diberikan PDI Perjuangan. Dimana PDI Perjuangan menegaskan sikap partainya kepada pemerintah dalam Kongres VI di Bali, Sabtu (2/8/2025). Megawati menyebut partainya tidak memosisikan diri sebagai oposisi pemerintahan, melainkan sebagai partai penyeimbang.

Megawati menegaskan arah sikap politik PDIP ke depan sebagai partai ideologis yang tidak tunduk pada arus politik praktis kekuasaan semata, melainkan teguh dalam garis perjuangan konstitusional dan ideologis.

"Saya tegaskan satu hal, dalam sistem pemerintahan presidensial seperti yang kita anut, tidak dikenal oposisi ataupun koalisi," tegas Megawati di hadapan ribuan kader dan pengurus PDI Perjuangan dari seluruh Indonesia.

Demokrasi Indonesia bukanlah demokrasi yang sekadar menjadi "blok-blok kekuasaan", tetapi demokrasi yang sejati, yang bertumpu pada kedaulatan rakyat dan konstitusi. Pernyataan ini disampaikan dalam konteks berbagai spekulasi arah politik PDIP pasca Pilpres 2024, terutama setelah partai banteng moncong putih itu tidak berada dalam barisan partai koalisi pemerintahan terpilih.

"Demokrasi kita bukan blok-blok kekuasaan. Tetapi demokrasi yang bertumpu pada kedaulatan rakyat dan konstitusi," kata Megawati dengan nada tegas.

Oleh karena itu, Presiden RI ke-5 tersebut menegaskan bahwa PDIP tidak akan serta-merta memosisikan

diri sebagai partai oposisi ataupun menjadi bagian dari koalisi. PDIP akan tetap berdiri tegak sebagai partai ideologis yang berpijak pada kebenaran dan bertindak sebagai penyeimbang untuk memastikan arah pembangunan tetap berjalan di dalam rel konstitusi dan sesuai dengan kepentingan rakyat.

"Oleh karena itu, PDI Perjuangan tidak memosisikan sebagai oposisi ataupun koalisi. Kita partai ideologis yang berdiri pada kebenaran, dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang untuk menjaga arah pembangunan dalam rel konstitusi dan kepentingan rakyat," ujarnya.

Ia juga menyatakan bahwa PDIP akan mendukung kebijakan pemerintah sejauh berada dalam kepentingan rakyat, namun tidak akan segan-segan menyuarakan kritik yang lantang jika nilai-nilai Pancasila terabaikan dalam praktik kenegaraan.

"Kita dukung kebijakan pemerintah. Tetapi akan bersuara lantang terhadap nilai-nilai Pancasila," pungkasnya.

Sementara itu, Politikus PDIP, Said Abdullah mengatakan sikap partainya kepada pemerintah yaitu tidak memosisikan diri sebagai oposisi pemerintahan, melainkan sebagai partai penyeimbang. Said pun mengistilahkannya menjadi sparring partner atau mitra strategis penyeimbang.

Sparring partner adalah istilah yang berasal dari dunia olahraga, khususnya tinju. Namun kini digunakan lebih luas dalam berbagai konteks.

PDIP menyebut sebagai sparring partner pemerintah Prabowo, artinya mereka tidak menjadi oposisi, tetapi tetap mengkritisi dan mengawasi kebijakan pemerintah secara aktif dan strategis.

Menurut Said, Megawati dalam kongres yang digelar tertutup, melihat kondisi Indonesia maupun global penuh dengan tantangan. Sehingga perlu adanya kerja sama dalam menyelesaikan tantangan tersebut.

"Memang Ibu Kota Umum menyampaikan bahwa tantangan

## Posisi PDIP dalam Pemerintahan Prabowo

### o Belum Dibahas

Mensesneg Prasetyo Hadi menegaskan tidak ada pembicaraan mengenai jatah kursi menteri untuk PDIP, meski partai itu telah menyatakan dukungan terhadap pemerintahan Prabowo.

### o Dukungan Tanpa Gabung

PDIP mendukung jalannya pemerintahan tanpa harus masuk kabinet, memilih peran sebagai penyeimbang yang memberi masukan dan menjaga mekanisme check and balance.

### o Sikap PDIP

Megawati menegaskan PDIP bukan oposisi dan bukan koalisi, melainkan sparring partner: mendukung kebijakan pro-rakyat, namun tetap kritis dan siap memberi alternatif solusi bila diperlukan.

domestik dan global yang kita hadapi semakin berat, penuh ketidakpastian, jalannya pasti terjal. Oleh karenanya kita akan mendukung pemerintah sebagai sparring partner sebagai penyeimbang, no opposition (bukan oposisi)," kata Said dilansir tribune Sabtu.

"Sparring partner, jika pemerintah benar, programnya kami akan lakukan. Jika kurang benar, kami akan memberikan alternatif solusi yang terbaik bagi pemerintah," tambahnya.

Oposisi dalam politik adalah elemen penting dalam sistem demokrasi yang berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan. Istilah ini merujuk pada kelompok atau partai politik yang tidak berada dalam pemerintahan dan biasanya memiliki pandangan atau kebijakan yang berbeda dari pihak yang berkuasa. (pra,ant,sit/lut)